

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anisa, D. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi dengan E-Court dan E-Litigation*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- As-Siddieq, T. M. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Effendi, J. (2008). *Kamus Istilah Hukum Populer Ed. Pertama*. Jakarta: Prenda Media Group.
- Emalia, S. S. (2025). *Analisis Penerapan ULtra Petita dalam Perkara Cerai Thalak Dihubungkan dengan Pasal 178 Ayat (2) dan Ayat (3) Herzein Inlandsch Reglement (HIR) di Pengadilan Agama Kota Banjar*. Ciamis : Skripsi Universitas Galuh.
- Fadhilah, I. (2024). *Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung .
- Fuadah, A. T. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatab*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, M. S. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Restu Gunung .
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Ibnu Khaldun, A. Z. (1992). *Kekeuasaan dan Negara Pemikir Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, B. (2005). *Restrukturisasi Badan Peradilan*. Jakarta: Majalah Hukum varia Peradilan Tahun xx.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group
- Marsis, E. (2021). *Reformulasi Regulasi Eksekusi Nafkah Madliyah Pada Cerai Talak yang Non Eksekusi Berbasis Kepastian Hukum*. Jawa Tengah: Amerta Media .
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mukti, A. (2018). *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar .
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama Dolengkapi Formulir Berperkara*. Bogor : Ghalia Indonesia .

- Ranuhandoko, I. (2000). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Saragih, S. S. (2005). *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan .
- Unaisah, T. (2023). *Penerapan Hak Ex Officio Hkaim dalam Menentukan Nafkah Iddah Akibat Hukum Cerai Talak* . Purwokerto: UIN prof. KH.Saiffudin Zuhri.

Jurnal dan Artikel

- Adams, R. S. (2021). *Ultra Petitum dan Hubungannya Dengan Asas Hakim Pasif Dalam Perkara Cerai Gugat* . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .
- Ariandi, B. S. (2014). *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono* . Jurnal Yuridika , Vol. 29, No.1, 111-112.
- Angkasa, N. (2013). *Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia* . Jurnal Siswo Metro, Vol.1, No. 2, 86.
- Aryana, R. A. (2025). *Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata* . Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.3, No.2, 115-119.
- Bahri, S. (2015). *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam* . Aceh: Kanun Jurnal Hukum, Vol.17, No.2, 381-399
- Desi Anggun Triani, P. S. (2023). *Penetapan Asas Hkim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang* . Jurnal Ilmiah Hukum , Vol.18, No. 2, 65-75.
- Fatahilah, M. d. (2021). *Penetapan Nafkah Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyus*. Jurnal yudisial , Vol.14, No.2, 22.
- Gustav, R. (1950). *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hartini. (2009). *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Beracara di Pengadilan Agama* . Jurnal Mimbar Hukum Vol.21, No.2, 203- 408.
- Hosein, Z. A. (2016). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Ihwanudin, N. (2016). *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama* . Jurnal Auliya , Vol.10, No.1, 57.
- Koesno, M. (1996). *Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945*. Jakarta: Jurnal Varia Peradilan, Vol.1, No.3, 90-95
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Mataram: Mataram University press.
- Novita, H. (2020). *Hak- Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsimpuan* . Tangerang: young Progressive Muslim .

- Nursobah, A. (2021, Agustus). Kekuasaan Kehakiman . *Kepaniteraan Mahkamah Agung*, p. 1.
- Nur, A. J. (2022). *Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim dalam Putusan Verrstek Perkara Perceraian . Jurnal Hukum Ius Quia IUSTUM* , Vol.29, No.2, 439-460.
- Racmatulloh, M. A. (2022). *Ragam Metode Penelitian*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.
- RI, M. A. (2013). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II*. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Peradilan Agama* . Sulawesi Selatan: IAIN parepare Nusantara Press.
- Sunarso, B. (2021). *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Prespektif Sosial Agama)* . Yogyakarta: Deepublish .
- Thariq, M. A. (2019). *Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hkim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak verstek Prespektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kbupaten Malang)*. *Journal of family studies*, Vol. 3, No.1, 2-3.
- Udin Latif, A. T. (2022). *Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Akim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong*. *Jurnal Hukum* , Vol.18, No.1, 56.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)